

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENCAPAI SDGs DESA
(STUDI KASUS PENURUNAN TINGKAT STUNTING DI DESA SAKRA SELATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

Lita Apriska¹, Vici Handalusia Husni², Jaka Anggara³, Muhammad Dzul Fadli⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

ABSTRAK

Fenomena stunting merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di negara berpendapatan rendah dan menengah karena hubungannya dengan peningkatan risiko kematian selama masa kanak-kanak. Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan.

Desa memiliki potensi untuk melakukan penanganan stunting, sesuai dengan UU tentang Desa mengenai upaya penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi Desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dan yang bersifat skala desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Belanja Desa untuk penangan stunting. Hal ini diperkuat dengan telah dikeluarkannya Permendesa No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Permendesa No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting.

Di Desa Sakra sendiri terdapat beberapa anak yang terindikasi mengalami stunting. Oleh karena itu pemerintah Desa Sakra Selatan melakukan beberapa program diantaranya yaitu dengan melakukan identifikasi masalah-masalah terkait dengan stunting dan melakukan konvergensi sesuai dengan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya stunting serta mengalokasikan anggaran dalam kegiatan-kegiatan mengenai konvergensi stunting di desa.

Kata kunci: Sustainable Development Goals, Stunting, Dana Desa

ABSTRACT

The phenomenon of stunting is a major public health problem in low- and middle-income countries because of its association with an increased risk of death during childhood. Stunting describes chronic undernutrition during the growth and development period from the beginning of life.

Villages have the potential to handle stunting, in accordance with the Law on Villages regarding efforts to deal with stunting which has become a national priority, it is very possible for Villages to develop relevant and village-scale activities through the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), Expenditure Plans Villages for stunting handlers. This was strengthened by the issuance of Permendesa No. 19 of 2017 concerning Priority for Use of Village Funds Permendesa No 19 of 2017 concerning Priority for Use of Village Funds 2018 related to Stunting.

In Sakra Village itself, there are several children who are indicated to be stunted. Therefore the government of Sakra Selatan Village carried out several programs including identifying problems related to stunting and carrying out convergence according to the problems that cause stunting and allocating a budget for activities regarding stunting convergence in the village.

Keywords: Sustainable Development Goals, Stunting, Village Fund

1. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals atau SDGs dapat diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah program pembangunan berskala dunia yang sifatnya universal, tanpa mendikotomikan antara negara berkembang dan negara maju. SDGs merupakan suatu sistem yang telah dirancang dan memiliki komitmen oleh para pemimpin bangsa, termasuk pemimpin Indonesia. SDGs ini dilaksanakan secara global dan makro (Fajar, 2021). SDGs atau pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, serta pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Sustainable Development Goals (SDGs) terlahir sebagai bentuk respon dari rasa kepedulian bersama untuk mewujudkan sebuah keadilan dan keamanan yang berkelanjutan bagi seluruh umat manusia untuk memperjuangkan kehidupan di bumi, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Sehingga, SDGs muncul sebagai wujud dari kepedulian bersama untuk membangun visi global yaitu pembangunan yang berkelanjutan merupakan kewajiban bagi seluruh negara di dunia. Mengingat bahwa sebelumnya telah terbentuk program pembangunan yang memiliki tujuan serupa dengan SDGs, meskipun cakupan yang dimilikinya tidak seluas dan seambisius SDGs, yaitu *Millennium Development Goals* (MDGs). Namun, MDGs dalam pelaksanaannya tidak bersifat terbuka, yang mana hanya menjadikan negara-negara berkembang sebagai objek dari pembangunan. Implikasi dari objektifikasi negara berkembang dalam pembangunan MDGs adalah bahwa negara-negara berkembang hanya menjadi ajang program pembangunan yang diselenggarakan oleh negara-negara adidaya (Woodbridge 2015).

Salah satu Negara yang menyepakati agenda SDGs adalah Pemerintah Indonesia, yang menunjukkan komitmen dan keserasiannya dalam pelaksanaan SDGs dengan diterbitkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan komitmen tersebut agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi kemasyarakatan secara

berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

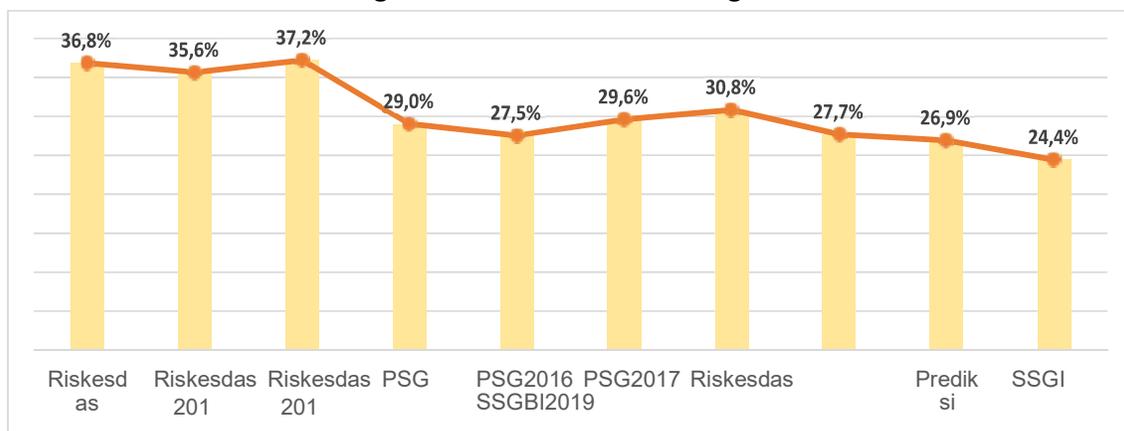
Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, SDGs memiliki program yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang di harapkan dapat tercapai. Upaya untuk mencapai target SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) IV 2020-2024 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019).

Realitanya, pembangunan SDM memiliki linearitas dengan fenomena stunting. Hal ini dapat dilihat dari diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan sejatinya bertujuan untuk menjaga eskalasi kesejahteraan ekonomi masyarakat secara kontinu, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan tata kelola yang dapat menjaga eskalasi kualitas kehidupan di tiap generasi. Upaya akselerasi perbaikan gizi secara fundamental merupakan tujuan kedua SDGs, ialah memutus rantai kelaparan, mewujudkan ketahanan pangan dan memberikan akses untuk perolehan nutrisi yang lebih mumpuni dan mendukung ragam aktivitas pertanian secara berkelanjutan. Mengacu pada perpres dan kebijakan pembangunan yang tertera di Bappenas, masalah stunting menjadi prioritas skala nasional, hal ini dikarenakan besarnya fenomena stunting yang terjadi di Indonesia.

Fenomena stunting merupakan masalah utama kesehatan masyarakat di negara berpendapatan rendah dan menengah karena hubungannya dengan peningkatan risiko kematian selama masa kanak-kanak. Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Keadaan ini dipresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO (WHO, 2018). Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang relatif pendek, pengaruh kekurangan gizi terhadap tinggi badan akan tampak pada waktu yang relatif lama sehingga indeks TB/U dapat digunakan untuk menggambarkan status gizi masa lalu (Supariasa, 2001).

Menurut laporan UNICEF, WHO, dan World Bank, diperkirakan sebanyak 149,2 juta balita atau sebesar 22% di dunia mengalami stunting pada tahun 2020 (Sukmalalana, 2022). Laporan tersebut mengungkap lebih dari setengah populasi anak balita di Asia yaitu sebesar 53% mengalami stunting dan dua dari lima anak tersebut di Afrika yaitu sebesar 41% mengalami stunting. Secara global, angka balita stunting terus menurun selama 20 tahun terakhir dari 203,6 juta menjadi 149,2 juta pada tahun 2020. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data dari hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 diketahui bahwa prevalensi balita stunting masih cukup tinggi karena berada pada angka 24,4% atau sebanyak 5,33 juta balita.

Grafik 1 Angka Prevalensi Balita Stunting di Indonesia



Sumber: Sukmalana, dkk, 2022.

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara tren, tingkat prevalensi menunjukkan penurunan dari 36,8% di tahun 2007 menjadi 24,4% di tahun 2021. Jika dilihat dari tahun ke tahun, tingkat prevalensi stunting cenderung fluktuatif, hal tersebut terlihat pada periode 2007-2013 yang mengalami peningkatan, kemudian menurun pada periode 2013-2016, dan kembali naik pada periode 2016-2018, yang selanjutnya terus menurun pada periode 2018-2021. Namun tingkat prevalensi tersebut masih berada di atas standar WHO yang menetapkan ambang batas prevalensi stunting sebesar 20%. Adapun data stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022 mencapai 18,8% dari total 477.430 anak. Persentase stunting terbesar berada di Lombok Utara yaitu 26,22%, Kota Mataram sebesar 24,38%, Lombok Tengah sebesar 23,29%, Lombok Barat sebesar 20,87%, Lombok Timur sebesar 18,82%, Kota Bima 16,67%, Dompu 14,16%, Sumbawa 10,26% dan Sumbawa Barat sebesar 9,22% (Lombok post, 2019).

Desa memiliki potensi untuk melakukan penanganan stunting, sesuai dengan UU

tentang Desa mengenai upaya penanganan stunting yang sudah menjadi prioritas nasional sangat memungkinkan bagi Desa untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang relevan dan yang bersifat skala desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Belanja Desa untuk penangan stunting. Hal ini diperkuat dengan telah dikeluarkannya Permendes No. 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Permendes No 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 terkait Stunting.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sakra Selatan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur dengan pusat pemerintahan berlokasi di Dusun Penede. Desa Sakra Selatan secara geografis terletak di bagian selatan wilayah Kecamatan Sakra dengan batas-batas wilayah sebelah utara: Desa Sakra, sebelah selatan: Desa Gelanggang, sebelah barat: Desa Borok Toyang, Sebelah Timur: Desa Montong Tangi. Desa Sakra Selatan Terdiri dari 8 dusun, terdiri dari 37 Rukun Tetangga (RT) dengan luas tanah sebesar 591,33 ha/m², Jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 2.552 KK.

Di Desa Sakra Selatan sendiri terdapat 25 anak yang terindikasi stunting pada tahun 2021, diantaranya 10 anak yang berisiko stunting dan 15 anak yang terindikasi stunting. Dalam upaya pencegahan stunting pemerintah Desa Sakra Selatan melakukan beberapa program dengan sasaran ibu hamil dan anak usia 0 sd 23 bulan (0 sd 2 tahun).

Dalam menunjang program/kegiatan untuk menurunkan tingkat stunting di Desa Sakra Selatan, pada tahun 2021 pemerintah desa mengalokasikan sebesar 20% (Rp 315.295.300) dari dana desa, dan anggaran tersebut habis terserap pada tahun tersebut. Pada tahun 2022 anggaran dana Desa yang dianggarkan meningkat sebanyak 25% dan baru direalisasikan sebanyak 20% sampai bulan November 2022 lalu.

Menurut hasil wawancara dari beberapa informan, tingkat stunting disebabkan oleh pendapatan keluarga yang relatif rendah, tingkat pemahaman masyarakat terutama dalam masalah gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat, sebagaimana dinyatakan oleh salah satu informan, Hary Rahman selaku Staff Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan, bahwa Stunting adalah gagal tumbuh bayi karena kekurangan gizi dan faktor lingkungan seperti air bersih, jarak rumah dengan kandang, kondisi rumah di lingkungan sekitar. Selain itu faktor yang mempengaruhi stunting adalah pola asuh orang tua dimana

pengetahuan orang tua yang kurang terhadap pemberian gizi selama hamil maupun sesudah mempunyai balita.

Kurangnya pengetahuan terkait dengan pemberian gizi ini selaras dengan informasi yang diberikan oleh salah satu orang tua balita yang menderita stunting, bahwa stunting yang dialami anaknya karena kurangnya pengetahuan tentang pemberian asupan gizi yang baik untuk anaknya, baik itu pada saat kehamilan dan setelah anak lahir dan tumbuh berkembang serta kondisi lingkungan rumah yang mereka tempati.

Terkait dengan kondisi lingkungan, Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dengan puskesmas terkait Infeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) untuk memonitoring dan memotivasi. Dimana IKL ini kegiatannya melakukan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat seperti kondisi pasar yang bersih, nyaman, aman, dan sehat dalam menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Selain Dinas Kesehatan, Desa yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan juga memiliki startegi-strategi tersendiri dalam penanganan stunting, diantaranya yaitu dengan melakukan identifikasi masalah-masalah terkait dengan stunting dan melakukan konvergensi sesuai dengan permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya stunting serta mengalokasikan anggaran dalam kegiatan-kegiatan mengenai konvergensi stunting di desa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam menurunkan tingkat tunting tersebut ada beberapa program yang dilakukan di Desa Sakra Selatan dalam melakukan pencegahan stunting yaitu mengangkat Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang bertugas memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting desa melalui aplikasi eHWD, posyandu balita dan ibu hamil, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, melakukan sosialisasi PMBA, pembuatan sanitasi, SPAL dilingkungan pemukiman ibu hamil dan baduta, pemeriksaan ibu hamil dan pemberian tablet fe, pengukuran ulang baduta yang terindikasistunting dan pemberian makanan tambahan (PMT) dan MPAsi, pendampingan khusus ibu hamil yang KEK dan resiko tinggi (RESTI), pengadaan sapras posyandu (linebord, pengukuran lingkaran kepala dan lengan, timbang bayi, statermeter, tikar pertumbuhan, media tumbuh kembang anak), pembuatan peraturan desa atau perdes tentang pencegahan stunting dan peniruan angka tunting desa dan melakukan sosialisasi tentang Kesehatan reproduksi dan anemia pada ibu hamil dan remaja putri.

Selain itu Upaya pemerintah desa dalam mendukung dan menyikapi stunting dengan

membuat peraturan desa tentang penurunan stunting yang menjadi acuan bagaimana menurunkan angka stunting di desa dari peraturan desa tersebut diterbitkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur dan menjadi kebijakan pemerintah desa dalam menurunkan tingkat stunting, oleh karena itu pemerintah desa membuat kegiatan-kegiatan atau disebut dengan konvergensi stunting yaitu membentuk tim yang di SK-kan dalam menurunkan angka stunting seperti Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang bertugas mendampingi keluarga terutama ibu hamil dan catin, selain itu dibentuk juga Rumah Desa Sehat yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan konvergensi stunting.

Namun dalam perjalanannya, program-program yang dilakukan untuk penurunan tingkat stunting tidaklah mudah dan menghadapi banyak kendala, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu informan, Harmaen Siswadi selaku Kasi Pelayanan Desa Sakra Selatan Mengatakan bahwa kendala dalam proses menurunkan tingkat stunting dalam mencapai SDGs Desa yaitu kesadaran maupun pemahaman masyarakat tentang stunting masih rendah terutama masalah gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang serta tingkat ekonomi yang rendah.

Hal yang sama disampaikan pula salah satu informan yang menyatakan bahwa Penghambat dalam penanggulangan stunting yaitu SDM, perekonomian, dan pengetahuan dari orang tua. Informan yang berasal dari Dinas Kesehatan menyikapi masalah stunting ini merupakan masalah yang sangat serius karena menyangkut kesejahteraan dimana stunting ini harus cepat ditangani agar tingkat stunting dapat menurun.

Namun, Dinas Kesehatan dan Pemerintah Desa tidak menyerah walaupun masih ada masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Kedua instansi tersebut tetap berkolaborasi dan bersinergi untuk menihilkan angka stunting di wilayah mereka menyesuaikan dengan tupoksi mereka masing-masing.

3. REFERENSI

- Putri SY. Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Pada Kasus Stunting Di Indonesia. *J PIR Power Int Relations*. 2021;5(2):163. doi:10.22303/pir.5.2.2021.163-174
- Hasanah M, NG Ratumbusang MF. Strategi Peningkatan Minat Wirausaha Mahasiswa Melalui Program Kreativitas Mahasiswa – Kewirausahaan (Pkm-K) Di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fkip Universitas Lambung Mangkurat. *J Socius*.

- 2017;6(02):294-313. doi:10.20527/jurnalsocius.v6i02.3478
- Hukum K, Kampung M, Memiliki MU, et al. Metodologi Penelitian. Published online 2013:66-79.
- Musri AO. Pelaksanaan Program Sustainable Development. UIN Suska Riau. Published online 2020.
- Encyclopedia. Manajemen Sarana dan Prasaran Penjasorkes di SD Negeri Kota Bengkulu. J Chem Inf Model. 2019;53(9):1689-1699.
- Oktyaninoor S. Analisis Penanganan Bagasi Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Garuda Indonesia Pt. Gapura Angkasa Di Yogyakarta International Airport. Skripsi STT Kedirgant Yogyakarta. Published online 2021:34-50.
- Andriary M, Antoine P. skripsi. 2019;2:89. Lombok Post (2019) <https://lombokpost.jawapos.com/>
- Nurhayati. Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Luar Negeri *Sustainable Development Goals*. Program Kerja Sama Kbrl Dan lain Lhokseumawe Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Damayanti S. Analisis Faktor Penyebab Kejadian Stunting pada balita Berusia 24-59 Bulan diDesa Temuroso Kecamatan Guntur kabupaten Demak Tahun 2020. FK Unissula. 2020;15(2):1-23.
- UNICEF. Sebuah Gambaran: SDG dan Anak-Anak di Indonesia. Published online 2016:1-16. https://www.unicef.org/indonesia/media/1651/file/SDG_Snapshot.pdf diakses 8 Desember 2020
- BAPPENAS. Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia. Kementeri Perenc Pembang Nas dan United Nations Child Fund. Published online 2017:1-105. https://www.unicef.org/indonesia/id/SDG_Baseline_report.pdf
- Zaini IF. Kebijakan Sustainable Goals (SDGS) Dalam Penggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa. 2021.
- Kementerian PPN. Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). In: Kementerian PPN. ; 2020.
- Anisa P. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 25-60 Bulan di Kelurahan Kalibaru Depok Tahun 2012. Univ Indones. Published online 2012:1-125.
- Riwayati S, Lestari T, Ariani NM, et al. Strategi Gerakan Cegah Stunting Menggunakan Metode Penyuluhan Di Desa Lubuk Belimbing 1 Bengkulu. J Empower. 2022;3(1):46. doi:10.35194/je.v3i1.2095
- Ibrahim IA, Faramita R. The relationship between family socio-economic factors and the incidence of stunting in children aged 24-59 months in the working area of the Barombong Health Center Makassar City in 2014. Al-Sihah Public Heal Sci J. 2015;7(1):63-75.
- Salmon HS, Moninjta DK. Jurnal governance. 2022;1(2):1-14.

Endy P Prawirohartono (2021) Dari Teori Dan Bukti Ke Implementasi Di Lapangan
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=teori+stunting&oq=teori+stun#d=gs_qabs&t=1671068748153&u=%23p%3DJlQkKcZo25lJ
Profil Desa Sakra Selatan (2017) <https://sakraselatanblog.wordpress.com/about/>